

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Andani, H. (2019). *Sengketa Pemilukada Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Andy, S., & Nur, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Arbas, C. (2012). *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. Jakarta: Sofmedia.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budhiati, T. S. (2019). *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gaffar, J. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Kontpress.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Janah, Z. O. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tirta Smart.
- Jaya, I. B. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Jonedin, E., & Ismu Gunadi Widodo. (2016). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grop.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaharuan HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Muhammad Iqbal, Suhendar, & Ali Imron. (2019). *Hukum Pidana*. Banten: Umpam Press.
- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu yang Bermartabat, Berorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rasyis, A., & Fahmi, R. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Salim, H., & Erlies, S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samuddin, R. (2013). *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press.

- Sekretaris Jenderal, B. (2015). *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.
- Silalahi, D. E. (2021). *Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Tahta Media Group.
- Sirajuddin, & Winardi. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press (Kelompok Instras Publishing).
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono, & Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Jawa Tengah: Muhammadiyah Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, A. (2023). *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Umar, S., & Moh, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Yuniarto, B. (2018). *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal :

- Afifah, W. (2014). "Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia". *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*. ISSN: 0853-8964.
- Arta, K. S. (2020). "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan tercapainya Pemilihan Umum Pada Tahun 1995 di Indonesia". *Jurnal Widya Citra*, Vol 1, No 2, E-ISSN 2722-8320.
- Bachtiar, F. R. (2014). "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi". *Jurnal Politik Profetik*, Vol 3, No 1.
- Dediansyah, A. (2019). "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang". *Journal Of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No 2, ISSN 2622-3740.
- Desak, I., & Brata, L. (2020). "Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia". *Jurnal Kertha Patrika*, Vol 42, No 1, ISSN 2579-9487.
- Ersan, P., & Erliyana, A. (2018). "Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Huku, Administrasi Negara)". *Pakuan Law Review*, Vol 4. No 1, ISSN: 2614-1485.
- Fahmi, K. (2015). "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Konstitusi : Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol 12, No 1.
- Hidayat, A. (2019). "Kajian Konstitusi Sebagai Landasan Dasar Terhadap

- Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 5, No 12, ISSN: 2580-0906.
- Isnawati, M. (2018). “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 18, No 2.
- Jamil, (2020). “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya”. *Perspektif*, Vol 25 No 1.
- Junaidi, M. (2020). “Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5, No 2, e-ISSN: 2580-8842.
- Kosasih, A. (2019). “Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis”. *Al Imara : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 2, No 1.
- Muhaemin, Hafid, A., Kusnandar, E., & Jiwantara, F. A. (2022). “Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima)”. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol 5, No 6, ISSN: 2614-8854.
- Nurhasim, M. (2014). “Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran : Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11, No 1.
- Pamungkas, A., & Arifin, R. (2019). “Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas *Black Campaign* dan *Negative Campaign*)”. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vo 17, No 1.
- Perbawa, S. L. (2019). “Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3, No 1, e-ISSN: 2581-2424.
- Pratiwi, O. C. (2017). Menjaga Kualitas Demokrasi Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu*, Vol 3, No 3.
- Prayinto, S. (2020). “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019”. *Electoral Research Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Santoso, T., (2013). “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 33 No 2.
- Sumertana, M., Lemes, I., & Remaja, I. G. (2021). “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng)”. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol 9, No 2.
- Yuliawati, N. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakkumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol 3, No 1.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020

